

SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Okky Chahyo Nugroho

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik

Kementerian Hukum dan HAM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan

Email : okies_ham@yahoo.com

(Naskah diterima :6/5/2013, direvisi :4/6/2013, disetujui : 17/6/2013)

Abstract

This study is a continued and multi-years research. In the first year, the data reveal about the management of flagship high school in Jakarta, West Java, Yogyakarta, and South Sulawesi, based on indicators of human rights-based education, and reveal the presence of data and international schools management in Jakarta. Based on the findings in the first year (2009), there has been three books that will be used as a guideline in the developing International Standard School (SBI), namely: (1) SBI development handbook (2) SBI curriculum development handbook, and (3) SBI workforce manual. Subsequently in the second year, third guidebook will be piloted in schools that are potential to become SBI. In addition, in the second year (2010) there will be: (1) SBI manual on students selection, (2) SBI teaching and learning process implementation guidebook, and (3) SBI finance guidebook. These handbooks will complement the development of the entire system in accordance with SBI rights-based education parameters. This research is a descriptive and evaluative research and was taken place in RSBI high school in Yogyakarta Province (SMAN 3 Yogyakarta, Yogyakarta SMAN 8, and SMA Muhammadiyah 2). The evaluative research is used to determine the success of the application of International School Development Handbook, Man Power Manual, and Curriculum Handbook. The experiment lasted for 8 months, from February to November 2010.

Keywords: Human Rights-Based Education, International School, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini merupakan kelanjutan sebagai penelitian multi-years. Pada tahun pertama, (1) mengungkapkan data tentang pengelolaan SMA unggulan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, berdasarkan indikator-indikator pendidikan berbasis hak asasi, dan (2) mengungkapkan data pengelolaan dan keberadaan sekolah-sekolah internasional di DKI Jakarta. Berdasarkan temuan-temuan tersebut pada tahun pertama (2009) telah disusun tiga buku pedoman yang akan dijadikan dasar dalam pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yaitu: (1) buku pedoman pengembangan SBI, (2) buku pedoman pengembangan kurikulum SBI, dan (3) buku pedoman ketenagaan SBI. Selanjutnya pada tahun kedua, ketiga buku pedoman tersebut akan diujicobakan di sekolah-sekolah yang SMU unggulan berpotensi menjadi SBI. Jika ditemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, ketiga buku pedoman tersebut akan lebih disempurnakan lagi. Selain itu, pada tahun kedua (2010) akan disusun pula: (1) buku pedoman seleksi siswa SBI, (2) buku pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar SBI, dan (3) buku pedoman pembiayaan SBI. Buku-buku pedoman tersebut akan melengkapi seluruh sistem pengembangan SBI sesuai dengan parameter-parameter pendidikan berbasis hak asasi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah evaluatif dan deskriptif dengan lokasi penelitian di SMA RSBI di Provinsi Yogyakarta (SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 8 Yogyakarta, dan SMA 2 Muhammadiyah). Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional, Buku Pedoman Ketenagaan, dan Buku Pedoman Kurikulum. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 8 bulan, dari bulan Pebruari sampai dengan Nopember 2010.

Kata kunci: Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia, Sekolah Bertaraf Internasional, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia jauh tertinggal. Itulah sebabnya pemerintah terus berpacu dengan melakukan upaya-upaya progresif dalam berbagai bidang seperti teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM). Persaingan ke depan akan semakin ketat karena produk-produk intelektual yang semakin inovatif berkembang dalam segala aspek kehidupan. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan penguasaan teknologi agar dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas keragaman produk (barang atau jasa), dan mutu produk. Keunggulan manajemen akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Keunggulan sumber daya manusia akan menentukan kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemenangan persaingan pada era global ini secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan manajemen yang kuat.

Terkait hal tersebut di atas, Pemerintah memiliki tanggung jawab mengembangkan sistem pengelolaan serta menggunakan kewenangannya menyiapkan sumber daya manusia unggul melalui sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu pranata kehidupan yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam membangun peradaban manusia.

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu termuat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendi-

dikan yang bertaraf Internasional.

Pendidikan bertaraf Internasional di Indonesia diawali dengan program rintisan yang dikembangkan dengan memberikan jaminan kualitas kepada stakeholders. Upaya ini dimaksudkan agar terwujud peningkatan mutu keluaran/lulusan yang mampu bersaing pada era global dan sekaligus diakui secara nasional. Amanat ini ditegaskan lagi dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pendidikan sebagai hak asasi manusia ini secara lebih spesifik dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi” . Terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik itu hak ekonomi, sosial dan budaya; maupun hak sipil dan politik.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, Pertama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minat dari siswa, pada dasarnya semua SMAN RSBI memperhatikan bidang olah raga. Pada SMAN RSBI di Jawa Barat proses penerimaan siswa baru dilakukan melalui seleksi bakat dan minat, khususnya calon siswa berprestasi olah raga dan seni. Calon siswa berprestasi olah raga, dapat diterima setelah lulus dalam seleksi penerimaan siswa baru. Kedua, dalam rangka ketersediaan (availability) kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang bertaraf internasional, maka SMA RSBI telah berupaya menghimpun dana yang memadai. Dana yang diperoleh oleh setiap SMA

RSBI berbeda-beda. Ketiga, dalam rangka ketersediaan (availability) kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang bertaraf internasional, maka para guru RSBI sangat memperhatikan siswa melalui pengelolaan dan pembinaan dengan mengoptimalkan segala sumber daya, dana dan sumber-sumber yang lain. Penampilan kerja para guru RSBI, khususnya dalam berpakaian sangat rapi, ramah, pantas, tepat waktu dan komunikatif. Dalam pendahuluan pembelajaran, guru RSBI ini mengkondisikan kelas, menjelaskan tujuan, target dan strategi pembelajaran.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya adalah Apakah buku pedoman pengembangan SBI, buku pedoman pengembangan kurikulum SBI, dan buku pedoman ketenagaan SBI sesuai dengan prinsip pokok hak asasi manusia? Apakah proses seleksi siswa, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan sumber pembiayaan SBI sesuai dengan prinsip pokok hak asasi manusia?

Tinjauan Pustaka

Terdapat 6 prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan hak pendidikan, yaitu:

1. Universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*). HAM merupakan hak yang melekat dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras bahwa setiap siswa berhak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi berdasarkan minat, bakat dan kemampuannya.
2. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*). HAM baik hak sipil dan politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak bisa terpisahkan. Kesempatan untuk sekolah kejenjang lanjutan merupakan pemenuhan hak sipil setiap warga negara. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya.
3. Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*). Baik secara keseluruhan maupun sebagian pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini menyangkut hak pendidikan setiap siswa untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.
4. Kesetaraan dan non-diskriminasi (*equality and non-discrimination*). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap siswa berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status sosial lainnya. Kesemuanya yang disebutkan bertitik tolak pada kemampuan, minat dan bakat siswa tersebut.
5. Partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*). Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif sebebaskan dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ini berarti siswa diberi kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan minat, bakat dan kemampuan.
6. Tanggung jawab Negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*), Negara bertanggung jawab untuk mentaati HAM dalam hal ini mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi warganya, termasuk memberi kesempatan bagi siswa yang mempunyai minat, bakat dan kemampuan untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas.

Tujuan Penelitian

Ketiga buku pedoman yang dihasilkan pada tahun pertama akan diujicobakan di sekolah-sekolah yang SMA Unggulan (RSBI) yang potensi menjadi SBI. Jika ditemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, ketiga buku pedoman tersebut akan lebih disempurnakan lagi.

Pada tahun kedua (2010) akan disusun pula: (1) Buku Pedoman Seleksi Siswa SBI, (2) Buku Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar SBI, dan (3) Buku Pedoman Pembiayaan SBI. Buku-buku pedoman tersebut akan melengkapi seluruh sistem pengembangan SBI sesuai dengan prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dan penelitian dan pengembangan. Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional, Buku Pedoman Ketenagaan, dan Buku Pedoman Kurikulum. Indikator yang terkait dengan uji coba buku pedoman dan gambaran SBI mencakup hal-hal sebagai berikut: Parameter instrumen, yaitu mencakup: pengetahuan tentang buku pedoman pengembangan sekolah bertaraf internasional, buku pedoman kurikulum, buku pedoman ketenagaan, proses seleksi administrasi penerimaan siswa, proses belajar mengajar, dan pembiayaan sekolah; Enam prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan HAM; Hasil penelitian ini, selanjutnya dianalisis untuk menjadi bahan pembuatan Pedoman Pengelolaan Sekolah Unggulan dan SBI tingkat SMA di seluruh wilayah tanah air. Beberapa Pedoman yang dihasilkan itu mencakup (1) Pedoman Seleksi Siswa SBI; (2) Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar SBI; dan (3). Pedoman Pembiayaan SBI.

PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi dan Data Lapangan

A. Hasil Evaluasi Buku Pedoman

1. Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional

Berdasarkan evaluasi buku pedoman pengembangan sekolah bertaraf internasional di SMA 3, SMA 8, dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, ada beberapa bagian yang perlu direvisi yaitu: ketidakkonsistenan penggunaan istilah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang sudah tidak dipakai lagi sejak tahun 2004 dan kembali menggunakan istilah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam buku pedoman ini juga ada beberapa bagian yang dianggap kurang tepat yaitu: a) bagian kriteria SMA bertaraf internasional, dalam bagian ini setiap poin perlu dijelaskan secara spesifik, sebagai contoh poin 8 yang menyatakan memiliki lahan minimal 10.000 m², dalam poin ini tidak menjelaskan secara spesifik maksud luas lahan apakah termasuk bangunannya atau hanya luas lahan; b) pengertian sekolah bertaraf internasional, pengertian yang ada di buku pedoman menimbulkan kebingungan dari para kependidikan. Pengertian sekolah bertaraf internasional dalam buku pedoman yaitu sekolah nasional yang memadukan dan mengimplementasikan dua kurikulum yakni kurikulum nasional dan kurikulum internasional plus. Maksud plus disini adalah kurikulum tambahan yang dipilih oleh sekolah sesuai minat siswa. Misalnya Bahasa Asing dan IT. Seharusnya menurut pemahaman mereka pengertian sekolah bertaraf internasional adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan/atau negara maju lainnya. pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju; c) target, dalam bagian

ini perlu ada penjelasan yang lebih detil pada setiap bagian dan bukan hanya sekedar informasi; dan d) model pengembangan kurikulum.

2. Buku Pedoman Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap buku pedoman kurikulum sekolah bertaraf internasional di SMA 3, SMA 8, dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ditemukan bahwa penyusunan kurikulum disusun oleh tim khusus pengembang kurikulum dan guru mata pelajaran. Evaluasi kurikulum dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek-aspek yang dinilai meliputi pencapaian standar kompetensi, sillabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta alokasi waktunya. Evaluasi ini dilakukan tiap tahun dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kurikulum berikutnya. Dengan demikian kurikulum yang digunakan akan selalu mengikuti perkembangan jaman dan relevan. Ada beberapa bagian yang kurang tepat di buku pedoman ini yaitu: a) struktur kurikulum sekolah bertaraf internasional; b) aspek yang diimplementasikan dalam kurikulum; c) format model kurikulum; d) kegiatan pengembangan diri; e) standar kompetensi; f) muatan lokal; dan g) ketuntasan belajar, sistem penilaian, penjurusan, pindah sekolah; tinjauan, revisi, dan pengembangan kurikulum. Alasan kurang tepatnya adalah kriteria ketuntasan minimal (KKM) ditentukan oleh guru dan siswa di kelas. Selain itu, hal-hal yang terkait dengan kurikulum mengacu pada aturan yang ada dan dibuat oleh sekolah (guru-guru) berdasarkan kesepakatan dengan memasukkan berbagai aspek yang relevan untuk meningkatkan mutu siswa. Implementasi kurikulum mengacu kepada standar internasional.

3. Buku Pedoman Ketenagaan

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap buku pedoman ketenagaan, SMAN 3 dan SMAN 8 menyatakan rekrutmen tenaga pendidik dilakukan melalui Dinas Pendidikan, dengan persyaratannya: (1) sarjana/S1 sesuai dengan kebutuhan, (2) tes dan wawancara. Tes dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah menerima guru sesuai dengan penempatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga pihak sekolah tidak dapat merekrut guru sesuai dengan kebutuhan program keahlian yang ada di sekolah. Ini merupakan salah satu kelemahan rekrutmen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta memberikan tanggapan lain, yaitu mengenai strategi pengadaan ketenagaan. Alasannya, apabila guru sudah berpendidikan S2 jarang yang mau menjadi guru dan walaupun ada biasanya dipromosikan menjadi kepala sekolah. Menurut mereka sangat sulit diterapkan di SMA ini mengenai kualifikasi guru minimal 30% berpendidikan S2 dan S3 yang relevan dengan bidang mata pelajaran dikarenakan alasan yang disebutkan di atas.

4. Hambatan

Secara garis besar hambatan yang dihadapi oleh pihak sekolah di SMA 3, SMA 8, dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta adalah keinginan dan harapan dalam penyelenggaraan pendidikan SBI di daerah sangat tinggi, namun masih didapatkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan mendasar yang perlu dibenahi yakni manajemen SBI merupakan sasaran yang sangat besar dan multi stratum. Peserta didik dalam program SBI merentang mulai penduduk usia dini hingga usia remaja. Dengan kata lain, garapan pendidikan pada SBI melebihi garapan pendidikan sekolah dengan latar belakang dan segmen peserta didik yang beragam. Problema-problema pokok dalam aspek manajerial ketiga jenis lembaga pendidikan tersebut berkaitan dengan:

Pertama, belum standarisasi kurikulum, ketenagaan (kepala sekolah, guru, pustakawan, laboran, tata usaha sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya). Kedua, perencanaan pendidikan masih bersifat terpusat dan belum komprehensif. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas pemahaman, apresiasi dan keterampilan dari aparat pemerintah dan masyarakat tentang karakteristik kelembagaan pendidikan SBI. Sehingga menyebabkan pula kurangnya partisipasi masyarakat dan stakeholders pendidikan dalam sistem penganggaran dan pembinaannya. Ketiga, walaupun pemerintah daerah telah memberikan keleluasaan penuh dalam manajemen pendidikan SBI kepada setiap satuan pendidikan, namun belum disertai dengan perangkat sistem dan aturan pelaksanaan yang memadai. Sehingga otoritas dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi program pendidikan masih dianggap tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal.

B. Hasil Data Lapangan

1. Seleksi Siswa

Berdasarkan hasil data lapangan di SMA 3, SMA 8 dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk penerimaan siswa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor:188/Adp/1550/2010 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Masuk SMP, SMA, dan SMK dengan Sistem Real Time On Line (RTO) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2010/2011. RTO (online waktu nyata), artinya rangkaian proses PPDB mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat

dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS. Tujuan dari sistem RTO ini adalah bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tersebut ditentukan persyaratan calon peserta didik baru yaitu: a) telah lulus SMP/MTs dan memiliki Ijazah; b) memiliki SKHUN; c) berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 12 Juli 2010; d) maksimal lulusan tahun 2008/2009; dan e). mengikuti tes khusus.

Ketentuan pendaftaran bagi calon peserta didik adalah: a) setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar; b) setiap calon peserta didik baru dimohon menunjukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); c) setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menunjukkan ijazah Asli SD/MI, menyerahkan satu lembar fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUASBN asli, menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUASBN yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan pengganti SKHUASBN, dan menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki.; d) setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA dan SMK wajib menunjukkan ijazah SMP/MTs Asli, menyerahkan satu lembar fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUN asli, menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUN yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan pengganti SKHUN, dan menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki; e) untuk calon peserta didik baru penduduk daerah diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga (C1) Asli dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (C1) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; f) pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan

kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2, 3, 4, dan 5; g) setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran; dan h) setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti PPDB sistem Real Time Online.

Untuk SMA Muhammadiyah 2 seleksi calon peserta didik melalui dua jalur yaitu Non RTO dan RTO. Akan tetapi yang diutamakan melalui Non RTO, apabila belum memenuhi kelas yang ditargetkan sebanyak dua kelas @ 32 siswa maka melalui jalur RTO. Setiap calon peserta didik berhak mendaftar ke SMA dan dapat memilih 3 (tiga) SMA dan maksimum 2 (dua) SMA negeri. Apabila diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMA saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran. Calon peserta didik yang telah mendaftar ke SMA dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMA, tidak dapat mendaftar lagi ke SMA. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dan tidak ingin mendaftar ke SMK dapat mencabut berkas pendaftaran. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menentukan dayaampung peserta didik yang akan diterima di setiap sekolah beserta kuota calon peserta didik dari keluarga miskin.

2. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar SBI

Proses belajar mengajar di SMA 3 dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta melakukan Moving Class, khususnya SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta melakukan belajar di lingkungan (Field Trip). Sedangkan SMA 8 Yogyakarta belum bisa melakukan Moving Class tetapi duduk dikelas dikarenakan masih terbatasnya ruang kelas.

Proses belajar mengajar dilakukan bilin-

gual (bahasa Indonesia-Inggris) namun adanya hambatan berupa sumber daya manusia para guru yang belum fasih Bahasa Inggris. Selain itu untuk modul yang diberikan di ketiga SMA diatas tidak semuanya dibahasakan dalam Bahasa Inggris (mata pelajaran Matematika) dikarenakan apabila dibahasakan akan mempunyai makna dan penerimaan yang berbeda.

Di ketiga SMA diatas menekankan proses belajar mengajar dengan melakukan teori, praktek seimbang, serta mengeksperimentasi, inovasi dan daya kreasi disetiap mata pelajaran. Komponen pendahuluan pembelajaran dilakukan dengan mengkondisikan kelas, melaksanakan apersepsi, menjelaskan tujuan, menentukan target, dan penyampaian strategi.

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru ke siswa di ketiga SMA ini menerapkan teknologi informasi komputer di semua pelajaran. Sebagai contoh penggunaan internet untuk mencari data dan referensi, membuat power point untuk presentasi dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran tersebut guru menerapkan standar minimal indikator hasil belajar melalui KKM.

Ketiga SMA diatas dalam proses pembelajaran sekolah yang dilakukan oleh guru menetapkan pelaksanaan pembelajaran yang interaktif dan inspiratif melalui pemberian tugas mandiri, tugas terstruktur dan memberikan pemecahan suatu permasalahan/solusi sehingga siswa dapat mengembangkan pemikiran untuk menyelesaikan persoalan.

Kandungan isi materi pembelajaran tidak terlepas dari muatan lokal (contohnya adanya pelajaran bahasa jawa dihari-hari tertentu, untuk SMA Muhammadiyah 2 pada hari Sabtu khususnya memakai bahasa Jawa dilingkungan sekolah). Internasional melalui pengetahuan dan teknologi, berwawasan nasional serta pengembangan keahlian masing-masing siswa.

Penerapan pembelajaran yang mengembangkan akhlak mulia, budi pekerti luhur dan ke-

pribadian unggul dilakukan disetiap pelajaran sekolah khususnya mata pelajaran PKN maupun kegiatan ekstra kurikuler seperti seni dan sebagainya. Penguatan dibidang kepemimpinan dilakukan melalui OSIS Diklat. Penguatan jiwa patriotisme, inovator, kreatif dan mandiri di SMA 3 Yogyakarta dengan melakukan pengembangan diri, kegiatan ekskul yaitu kepramukaan. SMA 8 Yogyakarta dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran di mulai, kegiatan outbond. Untuk SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menjabarkan dan implemmentasi visi, misi dan tujuan sekolah.

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan model-model eksplorasi, elaborasi, dan konformasi pada seluruh mata pelajaran di SMA 3 Yogyakarta SMA Muhammadiyah 2 melalui tugas terstruktur, tugas mandiri dan kelompok. Sedangkan SMA 8 Yogyakarta mengembangkan model PKL dan vilage homestay.

Pengembangan proses belajar mengajar diarahkan pada pengembangan PBM yang berbasis ICT dan penerapan active learning. Strategi pengembangan yang dapat ditempuh antara lain:

- a. Pendampingan atau fasilitasi dari konsultan dan/atau tenaga pengajar dari sister school terhadap kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
- b. Program magang dan/atau pertukaran tenaga pengajar dengan sister school.

Media yang digunakan di ketiga SMA tersebut untuk proses pembelajaran di kelas melalui modul, OHP, buku pelajaran televisi, video berbasis ICT dan LCD.

Sedangkan di SMA Islam Athirah mempunyai fasilitas dan kondisi sekolah yang sudah la-yak untuk menjadi Sekolah bertaraf Internasional. Sarana dan prasarana sudah modern dan canggih. Demikian juga untuk proses kegiatan belajar mengajar yang semuanya sudah

menggunakan laptop dan fasilitas media dan lab yang modern.

Sekolah Athirah juga memiliki sisterhood. Guru juga melakukan kunjungan atau studi banding ke Australia, Malaysia dan Singapura. Kurikulum yang digunakan adalah metode Cambridge karena tidak ada standar yang baku yang diberikan oleh dinas pendidikan untuk metode pendidikan yang diterapkan.

Adapun program proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, antara lain: praktikum, praktek lapangan, browsing, program remedial, program pengayaan dan asistensi atau tutor sebaya.

SMA Negeri 1 Makassar mendapatkan predikat sebagai sekolah favorit bagi masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya, terbukti setiap awal tahunnya memiliki angka tertinggi dalam pendaftaran calon siswa baru (pada proses penerimaan siswa baru: >1.900 orang/dari 288 jumlah kuota). Sejak tahun 2009/2010 mendapat kepercayaan sebagai Rintisan SMA Bertaraf Internasional dari Direktorat Pembinaan SMA. Pada tahun 2010-2011 SMAN 1 Makassar memasuki tahun kedua untuk program RSBI SMA.

Kegiatan belajar duduk di kelas dengan menggunakan bilingual Indonesia dan Inggris, sebagian besar masih menggunakan bahasa Indonesia. Belum sepenuhnya moving class, hanya pada enam mata pelajaran. Penggunaan bahan ajar aspiratif dengan perangkat computer dan LCD walaupun belum semua mata pelajaran. Adapun program kegiatan belajar mengajar, antara lain: tatap muka, tugas mandiri atau tugas mandiri tidak terstruktur. Siswa yang tinggal kelas langsung keluar dari sekolah.

Pembelajaran didukung oleh alat pembelajaran yang lengkap terutama untuk mata pelajaran produktif dan memberikan perhatian pada siswa dalam bentuk pemberian tugas presentasi setelah ada penjelasan dari guru secara berkelompok, tiap kelompok terdiri dari dua sampai tiga orang

siswa. Guru memelihara disiplin dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara memberi hukuman kepada siswa yang tidak disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Di kedua sekolah strategi yang dilaksanakan dalam mengorganisasikan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, presentasi, dan tanya jawab. Guru merasa senang dalam mengajar. Perilaku atau tujuan pembelajaran yang diharapkan disampaikan terlebih dahulu kepada siswa. Siswa mengetahui di mana memperoleh bantuan akademik melalui penjelasan guru. Guru mendorong sekolah untuk memberi pe-ngakuan atas perilaku positif siswa, jika ada siswa yang kurang baik perilakunya dibicarakan dengan ketua program studi. Di samping itu guru mengembangkan kecakapan komunikasi siswa melalui presentasi di depan kelas. Pengembangan kemampuan literasi media dan informasi dilakukan dengan cara penugasan di perpustakaan dan mengunduh (download) informasi melalui internet. Setiap akhir pelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya sebagai feedback terhadap pelaksanaan pembelajaran. Guru mendapat informasi siswa mana yang perlu diberi bantuan dan bantuan apa yang akan diberikan. Bimbingan lebih intensif diberikan oleh BP dan kesiswaan melalui kelompok bimbingan belajar. Siswa dapat memberikan saran (ada Kotak Saran) dan terbuka kepada Wali Kelas apabila menemukan hambatan. Strategi pengorganisasian yang demikian dapat dijadikan indikator pengorganisasian pembelajaran dalam SBI.

Penilaian pada proses dan hasil belajar di ketiga SMAN ini diupayakan melalui pengembangan instrumen penilaian autentik, yaitu penilaian yang diperoleh dari proses pembelajaran, untuk mengukur ranah kognitif, psikomotorik dan afektif para siswa.

Hasil belajar para siswa diukur melalui ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional, dan

ujian internasional. Ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional bersifat wajib. Pembelajaran minimal bilingual (immersion) dilengkapi dengan CD pembelajaran interaktif, dan buku-buku referensi yang cukup lengkap, dengan berbasis Information Communication Technology (ICT). Dalam hal ini juga digunakan laptop, proyektor, OHP, alat peraga, dan Lembar Kerja Siswa mencapai 1:15.

Di ketiga sekolah, persiapan guru dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menyusun rencana pembelajaran pada awal tahun ajaran dengan melihat kalender akademik. Perumusan tujuan pembelajaran telah dituliskan secara jelas mengandung perilaku hasil belajar sehingga dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Materi ajar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Di samping itu materi ajar diorganisasikan dengan runtut, sistematis, dan sesuai dengan alokasi waktu. Pemilihan sumber/media pembelajaran dengan tepat sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik. Sumber materi ajar yang dikomunikasikan kepada peserta didik berupa latihan soal dan terdapat kesesuaian metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75%. Di samping itu evaluasi direncanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang dikelola seperti di atas merupakan salah satu indikator SBI.

3. Pembiayaan

Sumber dana di ketiga sekolah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Komite Sekolah, donatur, alumni. Khusus SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta melalui hasil penyewaan asrama dan penyewaan gedung yang dipunyai oleh yayasan. Dari Pemerintah Pusat, maupun Provinsi prosentasi kecil sehingga dana lebih banyak dari komite sekolah.

Sumbangan sukarela oleh orang tua siswa bervariasi tergantung kemampuannya. Biaya SPP un-

tuk SMA 3 dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sekitar Rp 200.000-300.000 untuk SMA 8 Yogyakarta sekitar Rp 100.000-250.000.

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dana yaitu SMA 3 dan SMA 8 Yogyakarta melalui alumni yang cukup kuat sehingga dapat memberikan beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu sehingga dapat melanjutkan keperguruan tinggi, ada juga dari pihak swasta seperti bank, dan perusahaan lain, instansi lain. Khusus SMA 8 peran alumni tidak begitu besar. SMA Muhammadiyah 2 melalui pengembangan asrama, penyewaan gedung yayasan dan sumbangan tidak mengikat dari donatur.

Kebijakan yang mengalokasikan dana beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk SMA 3 Yogyakarta melalui Block Grant, RSBI, BKM, Prapus, Alumni, JPD, Komite Sekolah. SMA 8 Yogyakarta melalui seleksi dan ketentuan Pemerintah Kota Yogyakarta. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta melalui dana Block Grant, RSBI, pengalokasian LAZIS.

Ketiga SMA di atas menggunakan PAS dan SIAP online dana administrasi pengelolaan dengan menerapkan sistem informasi teknologi. Pengalokasian keuangan menetapkan prosedur penggunaan untuk memenuhi kriteria akuntabilitas di audit internal dan eksternal dan dilaporkan ke komite sekolah serta sesuai dengan PDM Kota Yogyakarta.

Di ketiga SMA ini adanya pengawasan atau pemantauan mengenai penggunaan dana sekolah bertaraf internasional melalui monev dari direktorat dan inspektorat Kementerian Pendidikan Nasional. Saran ke depan untuk SMA 8 Yogyakarta memberikan saran sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan syarat penerimaan seleksi siswa. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yaitu berupa dukungan input yang baik kondusif akan menghasilkan out yang lebih baik.

Sedangkan sumber dana yang ada untuk

pelaksanaan program Rintisan SMA Negeri 1 Makassar sebagai sekolah Bertaraf Internasional berasal dari:

Tabel 1. Sumber Dana

Sumber Dana	2009/2010	2010/2011
APBN (Pusat)	500,000,000	200,000,000
A P B D (Propinsi)	220,000,000	
APBD(Kab./Kota)	123,927,000	
Komite Sekolah	2,866,700,000	
Sumber Lain	-	-
Total	3,710,627,000	200,000,000

Sumber: SMA 1 Makasar

C. Sintesa

Hasil penelitian tentang jaminan eksplisit hak atas pendidikan dan hubungannya dengan kondisi seleksi calon siswa, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan pembiayaan SMA RSBI menunjukkan data sebagai berikut:

1. Seleksi Calon siswa

Dalam penerimaan siswa baru, proses seleksi diawali dengan seleksi administrasi, achievement test, tes kemampuan bahasa Inggris, tes psikologi dan tes wawancara. Proses seleksi siswa seperti dipaparkan di atas, sesuai dengan peraturan seleksi siswa untuk sekolah dalam kategori rintisan sekolah berstandar internasional. Jika kita analisis, mengapa hal ini dilakukan? Yaitu bahwa agar setiap siswa RSBI memiliki data administrasi yang lengkap dan valid. Selain itu, agar siswa RABI memiliki sikap yang tepat dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris dan terampil berbahasa Inggris sebagai alat untuk mengembangkan diri di dunia internasional.

Proses pengolahan data dilakukan secara sen-

tral, dan bersifat otomatis melalui penggunaan komputer. Adapun pengumuman hasil tes didistribusikan melalui internet. Jika dikaji lebih jauh, berbagai alat teknologi mutakhir termasuk alat-alat laboratorium di lingkungan RSBI diperlukan sebagai alat pendukung. Cara ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan layanan pendaftaran dengan cepat, transparan dan bertanggungjawab secara penuh.

Sesuai dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah ikut menentukan jumlah daya tampung siswa RSBI, meskipun adakalanya tidak semua terwujud sesuai harapan pemerintah, karena ada kalanya beberapa siswa mengundurkan diri. Pada sisi lain, Pemda juga memperhatikan siswa yang berprestasi khususnya di bidang olah raga. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha membantu memberikan penambahan nilai pada jumlah nilai UASBN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB.

Hal di atas merupakan salah satu prinsip HAM yang menyangkut indivisibility (tidak bisa dibagi), baik hak sipil dan politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak bisa terpisahkan. Kesempatan untuk sekolah kejenjang lanjutan merupakan pemenuhan hak sipil setiap warga negara. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya.

Beberapa kondisi di atas, menunjukkan bahwa proses seleksi siswa sudah merepresentasikan tersedianya pendidikan bagi setiap siswa. Sekolah sudah mengupayakan setiap calon siswa mempunyai hak sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara antara calon siswa satu dengan calon siswa lainnya. Calon siswa dapat dengan mudah mengakses informasi dan mendaftar ke sekolah dengan

memenuhi kriteria tertentu. Perhatian terhadap calon siswa dilakukan dengan membuat lingkungan yang kondusif dan interaksi yang cukup akrab. Pemda juga berkontribusi untuk memperhatikan calon siswa yang berprestasi di bidang olah raga, dengan cara menerima calon siswa di SMA RSBI melalui bantuan penilaian di UASBN. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengacu atau beradaptasi terhadap pedoman rekrutmen calon siswa RSBI.

Berbagai pencapaian di atas muncul, karena upaya yang sungguh-sungguh dari penyelenggara pendidikan, khususnya pada sample penelitian, seperti di SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 8 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

2. Pelaksanaan proses Belajar Mengajar

Sebagai pemenuhan atas prinsip pembelajaran, maka di SMA RSBI proses pembelajarannya dilakukan secara bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), meskipun adakalanya masih belum sempurna. Hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan penguasaan bahasa Inggris para guru maupun siswa yang relatif masih rendah. Misalnya, modul matematika masih belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena menghindari adanya salah tafsir atau beda makna. Pembelajaran dilakukan dengan metode teori dan praktek langsung, sehingga terjadi interaksi yang intensif antara guru dengan para siswa. Hal ini sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh seorang tokoh pendidikan yakni Achmad Sanusi, bahwa “dalam pembelajaran hendaknya selalu diupayakan agar tercipta transactional dialogic yang optimal antara guru dengan para siswa”. Interaksi yang intensif ini didukung pula oleh teknologi informasi komputer, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kondusif. Teknologi komputer diperlukan karena pembelajaran di SMA RSBI menuntut dokumen yang lengkap dan valid dan hal ini dapat terlaksana apabila ada alat pendu-

kung yang tepat.

Salah satu tujuan utama pendidikan nasional adalah membangun budi pekerti atau akhlak yang mulia. Upaya untuk mencapai akhlak yang mulia dan kepribadian yang luhur ini, dikembangkan di dalam proses pembelajaran, baik secara teori maupun secara praktik. Selain itu diberikan contoh-contoh teladan dari seluruh pihak yang berlangsung di lingkungan pendidikan sekolah, bahkan juga seyogyanya di luar lingkungan pendidikan. Hal ini dipandang penting oleh pihak sekolah, mengingat budi pekerti luhur ini tidak cukup dibangun hanya melalui nasehat para guru, melainkan juga contoh nyata yang ditampilkan guru dalam keseharian mereka, baik dalam interaksi dengan siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Kompetensi dapat dicapai oleh para siswa karena tersedianya berbagai fasilitas pendidikan, seperti modul, OHP, buku pelajaran, dan Televisi, Vidio, yang berbasis LCD dan ICT.

Berbagai paparan di atas, merepresentasikan bahwa proses pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk merasakan nilai—nilai universal HAM berlaku dalam interaksinya dengan guru dan warga sekolah lainnya. Belajar melalui teori dan praktek juga menjadikan siswa merasakan keajaiban “learning by doing” bahwa belajar sambil bekerja manfaatnya sangat banyak, karena memacu motivasi para siswa untuk terus meningkatkan kemampuan diri melalui belajar. Proses pendidikan pun selayaknya dikelola guru-guru profesional yang terus berusaha meningkatkan kemampuan diri secara berkelanjutan (quality improvement) sehingga pada akhirnya mampu mencapai hasil belajar siswa yang berkualitas internasional atau mencapai pengakuan internasional dalam standar pendidikan berstandar internasional. Melalui kondisi seperti dipaparkan di atas, pihak sekolah dipandang siswa sebagai lembaga

yang berkontribusi dan bertanggung jawab penuh pada pencapaian mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan tugas utama SBI yang mengacu pada standar salah satu Negara anggota EOOD.

Apabila ditelusuri lebih jauh, maka dapat diketahui bahwa SMA RSBI di Indonesia, telah mentaati sistem yang berlaku dalam norma-norma dan konsep SBI. Pengelola SMA RSBI telah bertanggung jawab secara optimal untuk mentaati instrumen HAM atau norma hukum untuk mengangkat derajat dan martabat manusia melalui pendidikan yang berstandar internasional, yakni salah satu anggota OECD.

Proses belajar mengajar merupakan partisipasi dan kontribusi (participation and contribution) bagi setiap orang dan seluruh masyarakat. Oleh karena karena siswa maupun guru berhak untuk turut berperan aktif sebebaskan dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui proses belajar mengajar di sekolah dengan baik dan benar serta berkualitas.

Pasal 13 ayat Kovenan Hal Ekosob yang mengatakan bahwa “...pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia sutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya serta harus memperkuat penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar...”

3. Pembiayaan

Pendidikan yang berkualitas membutuhkan dana yang memadai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pengelolaan SMA RSBI berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terutama atau paling banyak berasal dari Komite Sekolah. Dana pendidikan yang lain berasal dari pihak swasta, yaitu bank, alumni, sumbangan pembangunan pendidikan dan sumbangan pembangunan gedung dan berbagai sumbangan yang tidak mengikat. Ada pula kebijakan untuk membantu siswa kurang mampu, yakni melalui ban-

tuan hukum dana block grant dan JPD. Hal ini bisa terjadi karena pencapaian mutu pendidikan yang baik, pasti menuntut dana yang tidak sedikit, baik untuk fasilitas pendidikan, maupun untuk peningkatan kualitas guru dan dana manajemen operasional sekolah yang berkaitan dengan berbagai sumber daya yang harus disiapkan dan dimanfaatkan. Mekanisme pembiayaan pendidikan di SMA RSBI sebagaimana disebutkan di atas secara umum telah sesuai dengan peraturan tentang sistem dana RSBI yaitu PP No.48/2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Berkaitan dengan HAM, memperoleh pendidikan bermutu merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia yang tidak dapat dipisahkan. Semua orang memiliki hak yang sama, dan sederajat untuk mendapatkan pendidikan, termasuk untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pendidikan bagi anak-anak kurang mampu adalah hak yang inheren yang merepresentasikan haknya terhadap pendidikan yang berkualitas, siswa-siswa miskin di SMA RSBI, dipandang memiliki status dan hak yang sama dan tidak dapat digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis dalam kaitannya dengan hak berpendidikan.

Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia equality and non-discrimination (kesetaraan dan non-diskriminasi). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap siswa berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status sosial lainnya. Kesemuanya yang disebutkan bertitik tolak pada kemampuan, minat dan bakat siswa tersebut.

Demikian juga upaya mencapai mutu pendidikan berkualitas, memerlukan dukungan dana yang cukup memadai. Pengelola SMA RSBI telah melakukan berbagai upaya sesuai PP 48/2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Para siswa termasuk siswa kurang mampu di SMA RSBI secara umum telah mendapat dukungan dana yang cukup meski belum sepenuhnya optimal, sehubungan dengan terbatasnya dana yang dapat dikumpulkan oleh beberapa SMA RSBI.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional yang mendukung terlaksananya pemenuhan prinsip hak asasi manusia membutuhkan penyempurnaan berkaitan dengan penggunaan kriteria dan pengertian sekolah bertaraf internasional yang kurang rinci dalam penjelasannya. Hal ini memberikan kendala bagi pihak pendidik untuk mengajukan sekolahnya sebagai SBI. Dalam pengembangannya SBI harus memperhatikan rekrutmen dan penempatan guru. Hal ini terkait dengan kemampuan mengajar dan mutu pendidikan yang akan diperoleh oleh siswa. Sekolah bertaraf Internasional dalam pengembangannya harus memenuhi standar bertaraf internasional sesuai dengan indikator standar efektifitas kinerja minimal RSBI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009.
2. Buku Pedoman Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional yang mendukung terlaksananya pemenuhan prinsip hak asasi manusia membutuhkan penyempurnaan karena belum menggambarkan struktur kurikulum sekolah bertaraf internasional, aspek implementasi dari kurikulum bertaraf internasional, isi dan standar kompetensi kelulusan yang harus dicapai merujuk pada Permendiknas No.78 Tahun 2009.
3. Buku Pedoman Ketenagaan Sekolah Bertaraf Internasional yang mendukung terlaksananya pemenuhan prinsip hak asasi manusia membutuhkan penyem-

purnaan karena belum menjelaskan pola rekrutmen atau seleksi guru RSBI yang lebih rinci. Dalam hal sumberdaya manusia perlu dijelaskan bahwa penempatan guru harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Adanya ketentuan kualifikasi guru minimal 30 % berpendidikan S2 dan S3 serta relevan dengan bidang mata pelajaran sulit dite-rapkan karena minat guru akan cenderung untuk menjadi kepala sekolah. Dalam penempatan sumber daya manusia dalam hal ini guru SBI harus memiliki kemampuan berbahasa inggris yang mendukung dalam proses belajar dan mengajar.

4. Proses seleksi siswa Sekolah Bertaraf Internasional yang mendukung terlaksananya pemenuhan prinsip hak asasi manusia dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dinas Pendidikan de-ngan persyaratan yang harus dipenuhi. Proses pedoman penerimaan peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis dengan sistem komputer sampai dengan pengumuman seleksi. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penerimaan siswa baru, proses seleksi diawali dengan seleksi administrasi, achievement test, tes kemampuan bahasa Inggris, tes psikologi dan tes wawancara. Sesuai dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah ikut menentukan jumlah daya tampung siswa RSBI, meskipun adakalanya tidak semua terwujud sesuai harapan pemerintah, karena ada kalanya beberapa siswa mengundurkan diri. Hal di atas merupakan salah satu prinsip HAM yang menyangkut indivisibility (tidak bisa dibagi), baik hak sipil dan politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak bisa terpisahkan. Kesempatan untuk sekolah kejenjang lanjutan meru-

pakan pemenuhan hak sipil setiap warga negara. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya.

5. Proses Pembiayaan

Pendidikan yang berkualitas membutuhkan dana yang memadai. Dalam pengelolaan SMA RSBI dana berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terutama atau paling banyak berasal dari Komite Sekolah. Dana pendidikan yang lain berasal dari pihak swasta, yaitu bank, alumni, Sumbangan Pembangunan Pendidikan dan sumbangan pembangunan gedung dan berbagai sumbangan yang tidak mengikat. Ada pula kebijakan untuk membantu siswa kurang mampu, yakni melalui bantuan hukum dana block grant dan JPD. Hal ini merupakan upaya untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak kurang mampu sebagai perwujudan prinsip equality and non-discrimination (kesetaraan dan non-diskriminasi). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap siswa berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan lainnya, kewargane-garaan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status sosial lainnya.

6. Proses Belajar dan Mengajar

Sebagai pemenuhan atas prinsip pembelajaran, maka di SMA RSBI proses pembelajarannya dilakukan secara bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Proses belajar dan mengajar diupayakan menggunakan bahasa inggris. Namun beberapa materi pelajaran belum bahasa inggris. Pembelajaran dilakukan dengan metode teori dan praktek langsung, sehingga terjadi interaksi yang intensif antara guru dengan para siswa. Belajar melalui teori dan praktek juga menjadikan siswa merasakan keajaiban “learning by doing” bahwa belajar sambil bekerja manfaatnya sangat banyak, karena memacu motivasi para siswa untuk terus meningkatkan ke-

mampuan diri melalui belajar. Proses pendidikan pun selayaknya dikelola guru-guru professional yang terus berusaha meningkatkan kemampuan diri secara berkelanjutan (quality improvement) sehingga pada akhirnya mampu mencapai hasil belajar siswa yang berkualitas internasional atau mencapai pengakuan internasional dalam standar pendidikan berstandar internasional.

Saran

1. Buku Pedoman Pengembangan perlu dilengkapi dengan penjelasan yang lebih rinci terhadap kriteria dan pengertian sekolah bertaraf internasional agar lebih jelas untuk dipahami oleh pendidik dalam meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi SBI. Hal ini akan mempermudah sekolah untuk melihat dan membandingkan standar sekolah yang dimilikinya dan upaya untuk meningkatkannya menjadi SBI, sehingga tidak muncul perlakuan yang diskriminatif terhadap suatu sekolah.
2. Buku Pedoman Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan dapat memberikan gambaran struktur kurikulum sekolah bertaraf internasional, aspek implementasi dari kurikulum bertaraf internasional, isi dan standar kompetensi kelulusan yang harus dicapai merujuk pada Permendiknas No.78 Tahun 2009.
3. Buku Pedoman Ketenagaan Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan dapat menjelaskan pola rekrutmen atau seleksi guru RSBI yang lebih rinci sehingga dapat diperoleh guru dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk meningkatkan kemampuan guru SBI dalam proses belajar dan mengajar dan kemampuan bahasa inggris perlu ditingkatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan juga pelatihan bahasa inggris yang mendukung kemampuan guru dalam proses belajar dan mengajar. Untuk meningkatkan kreativitas dan pengetahuan guru kegiatan kunjungan atau studi banding ke sekolah percontohan baik di dalam maupun di luar negeri merupakan hal yang penting dan mendukung peningkatan wawasan ketenagaan SBI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hafid. *Communtty-Based Education: Roads to Indonesian Education from Crises to Recovery*, Jakarta: Balantika, 2003.
- , Hafid Abbas, *Pendidikan Nasional Berbasis Hak Asasi dalam Perspektif Kebangkitan Nasional*, (Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap di FIP UNJ, 16 Juni 2008).
- Abbas, Hafid dan Purna, Ibnu, *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009*, Jakarta: Cidesindo, Cetakan ke Tiga, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Penyelenggaraan: Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- , *Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, 2008.
- , *Panduan Pelaksanaan: Subsidi Program Pengembangan Rintisan SMA Bertaraf Internasional*, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA, 2009.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2005.
- Hanafi, Abdillah. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1987.
- HAR Tilaar, *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*, Jakarta: Grasindo, 1995.
- Drs. Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 2003.
- Ministry of Education and Culture, *Key Aspect of Indonesian Development*, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Ministry of Education and Culture, *National Plan of Action on Education 2003-2015*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002.
- Republik Indonesia, Republik Indonesia. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886.

-----, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU SPN Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia.

Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F. *Communication of Innovations*, London: The Free Press, 1971.

Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*, London: The Free Press, 1983.

-----, *Diffusions of Innovations*, Fourth Edition. New York: Tree Press, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Tomasevski, Katarina, *Manual on Right-Based Education: Global Human Rights Requirements Made Simple*, UNESCO, Bangkok, 2004.

-----, *The Right to Education in Indonesia*; Geneva: Commission on Human Rights, 2002 – Report submitted by Special Rapporteur, in accordance with Commission Resolution 2002/2003.